

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat menjadi ciri utama dari era digital saat ini, yang berimplikasi luas pada berbagai sektor kehidupan, terutama dunia bisnis. Inovasi yang muncul seperti sistem pembayaran digital, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi. Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul berbagai inovasi dalam ranah teknologi keuangan (*fintech*). *Fintech* sendiri merepresentasikan aplikasi teknologi yang dirancang untuk mengoptimalkan layanan di sektor finansial (Ibnu et al., 2021). Adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran digital menunjukkan pertumbuhan substansial di wilayah Indonesia. Dikembangkan secara kolektif oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), QRIS didefinisikan sebagai platform pembayaran yang memanfaatkan teknologi QR Code. QRIS diimplementasikan guna menyederhanakan mekanisme transaksi digital serta membangun sistem pengawasan yang terintegrasi (Apridianto, 2025). Selain itu, QRIS juga memudahkan proses transaksi melalui beragam dompet digital dengan memanfaatkan satu kode pembayaran terpadu (Poerwanengsih & Wany, 2024).

Sejak resmi diluncurkan secara nasional pada tahun 2019, implementasi QRIS di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tercatat sekitar 124 juta transaksi menggunakan QRIS dengan cakupan lebih dari 3,6 juta pelaku UMKM yang bergabung dalam ekosistem digital ini. Pertumbuhan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2021 dengan total transaksi mencapai 375 juta, dan kembali meningkat menjadi lebih dari 675 juta transaksi pada tahun 2022. Memasuki tahun 2023, tren penggunaan QRIS semakin menguat. Hingga Februari 2023 saja, volume transaksi bulanan telah mencapai 121,8

juta dengan nilai transaksi sebesar Rp12,28 triliun. Jumlah pengguna pun bertambah signifikan menjadi lebih dari 30 juta pengguna dengan lebih dari 24 juta merchant. Pada tahun 2024, nilai transaksi QRIS mencapai angka Rp42 triliun secara tahunan, dengan jumlah pengguna meningkat menjadi sekitar 50 juta orang dan merchant mencapai lebih dari 32 juta. Pertumbuhan yang paling mencolok terjadi pada awal tahun 2025. Selama kuartal I, QRIS mencatat lebih dari 2,6 miliar transaksi dengan total nilai transaksi mencapai Rp262,1 triliun. Hal ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 35 juta *merchant* telah memanfaatkan QRIS namun, adopsi QRIS secara keseluruhan belum mencapai tingkat yang maksimal. Sebagian besar pengguna masih belum menjadikannya sebagai metode transaksi utama, dan masih menggunakan pembayaran tunai (Visa, 2024). QRIS merupakan inovasi transformatif (*game changer*), dengan 67 persen pengguna berasal dari UMKM (Bank Indonesia, 2025). Implementasi sistem pembayaran ini tidak hanya memfasilitasi keterhubungan dan kemampuan operasional antar platform, melainkan turut mendorong inklusivitas akses finansial bagi seluruh konsumen dan pelaku UMKM di Indonesia. QRIS memberikan perlindungan terhadap privasi dan didukung oleh sistem keamanan data yang kuat, namun pada kenyataannya minat UMKM dalam menggunakan QRIS masih rendah.

Penggunaan QRIS pada dasarnya banyak dampak positif terutama dalam mendorong transformasi digital disektor keuangan. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan inklusi keuangan, karena QRIS memungkinkan masyarakat yang tidak mempunyai rekening bank untuk tetap dapat melaksanakan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai melalui aplikasi dompet elektronik. Selain itu, QRIS menyederhanakan proses transaksi dengan meningkatkan kecepatan, kepraktisan, dan efisiensi melalui pemindaian kode QR, sehingga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan uang tunai (Bakri et al.,

2025). Dampak positifnya tidak hanya pada konsumen saja, tetapi turut dirasakan bagi pelaku usaha, untuk menerima pembayaran digital tanpa menyediakan kembalian yang terkadang uang pecahan yang sulit dicari. Selain itu dengan adanya QRIS juga dapat mengurangi adanya penyebaran uang palsu (Mustagfiroh & Supriyadi, 2024). Dengan demikian, QRIS turut berkontribusi dalam memperluas cakupan ekonomi digital dan mendorong distribusi pertumbuhan ekonomi secara merata di Indonesia .

QRIS memiliki banyak manfaat, tetapi penggunaannya juga menimbulkan dampak negatif yang perlu untuk diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah ketergantungan terhadap teknologi dan jaringan internet. Di daerah dengan konektivitas yang buruk, penggunaan QRIS menjadi tidak efektif dan dapat menghambat proses transaksi. Selain itu, tidak semua pelaku usaha, terutama yang berusia lanjut atau kurang melek digital, mampu beradaptasi dengan sistem pembayaran berbasis QR ini, sehingga bisa tertinggal dalam persaingan. Risiko keamanan data juga menjadi perhatian, karena penggunaan sistem digital membuka peluang terhadap pencurian data pribadi atau penipuan jika pengguna tidak berhati-hati (Sukarna, 2022). QRIS juga terkadang *error*, dari hasil observasi kepada salah satu UMKM bidang kuliner di Kabupaten Sleman yang menggunakan QRIS dalam metode pembayarannya ketika QRIS *error* saldo pembeli sudah diambil tetapi belum masuk ke dalam aplikasi sistem QRIS penjual, hal tersebut dikarenakan saldo menggantung dan pembeli harus melakukan pembayaran ulang, dan permasalahan QRIS saldo menggantung tersebut harus diurus oleh kedua belah pihak bank masing-masing penjual dan pembeli. Selain itu beberapa penjual yang menanggung biaya Merchant Discount Rate (MDR) kepada pembeli padahal hal tersebut harus ditanggung penjual berdasarkan regulasi yang berlaku pada pasal 52 ayat (1) PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, secara eksplisit melarang penyedia barang dan jasa membebankan surcharge kepada konsumen untuk menutupi biaya yang dikenakan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). MDR yakni tarif yang dikenakan oleh PJP kepada

merchant atas setiap transaksi yang dilakukan melalui fasilitas QRIS. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, setiap PJP memiliki kewajiban untuk menjamin kepatuhan merchant terhadap larangan pengenaan biaya tambahan (surcharge) kepada konsumen. Namun beberapa penjual di Kabupaten Sleman ini yang melanggar aturan tersebut dengan membebankannya kepada pembeli. Permasalahan ini dapat menjadi faktor penghambat dalam mendorong ketertarikan masyarakat terhadap penggunaan teknologi khususnya dalam penggunaan QRIS (Ibnu et al., 2021).

Aktivitas bisnis terutama UMKM, pada penyusunan laporan keuangan mempunyai peranan yang sangat krusial dalam mendukung pencapaian target penjualan dan perolehan keuntungan (Puspita et al., 2022). Proses ini mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan penyediaan serta pemanfaatan mengacu pada perilaku penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas. Kinerja yang dihasilkan dari kesesuaian antara tugas dan teknologi mencakup peningkatan efisiensi, efektivitas, serta kualitas dalam penggunaan teknologi, yang pada gilirannya menghasilkan kinerja sistem informasi yang lebih optimal. Peningkatan kinerja tersebut terjadi karena teknologi mampu memenuhi kebutuhan individu untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. TAM memfokuskan pada dua faktor utama yang memengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna, yaitu penyampaian suatu informasi keuangan yang memiliki keakuratan serta disampaikan secara tepat waktu (Apridianto, 2025). Pelaku UMKM semestinya melakukan proses pencatatan keuangan dalam setiap transaksi usahanya (Mulyani et al., 2024). Di Indonesia, pedoman pelaporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditujukan untuk UMKM. Beberapa permasalahan yang sering dialami oleh pelaku UMKM antara lain meliputi terbatasnya pengetahuan keuangan, pengelolaan keuangan yang masih sederhana, ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan yang

memadai, serta ketidakterpisahkannya keuangan pribadi dan usaha (Rahmadiani et al., 2024). Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan, meskipun dampaknya sulit untuk diukur. Dengan demikian, diperlukannya cara guna menambah tingkatan meningkatkan kinerja UMKM adapun tujuannya memberikan penjelasan yang mendalam tentang literasi keuangan, khususnya tentang cara penyusunan laporan keuangan yang tepat dan penggunaan sistem pembayaran yang lebih efisien melalui QRIS.

UMKM di Indonesia berperan signifikan dalam menopang perekonomian nasional, baik melalui kontribusinya terhadap produk domestik bruto maupun kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Penelitian terkini menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan mempekerjakan sekitar 97% tenaga kerja nasional, sehingga keberadaannya menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Hasbiah et al., 2025). UMKM dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan pada tingkat lokal, seperti aksesibilitas terhadap lapangan kerja, kualitas jaringan transportasi, serta ketersediaan infrastruktur digital. Faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya perbedaan konsentrasi UMKM antara wilayah yang memiliki dominasi fungsi permukiman dan wilayah yang memiliki fungsi komersial yang lebih kuat (Widita et al., 2024). Perkembangan teknologi juga menjadi pendorong utama transformasi UMKM di Indonesia, khususnya melalui digitalisasi, inovasi, dan peningkatan literasi, termasuk literasi keuangan. Penerapan teknologi digital terbukti berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan UMKM, terutama dalam masa pemulihan pasca pandemi (Rosyidiana & Narsa, 2024).

UMKM di Kabupaten Sleman memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, dengan mengalami pertumbuhan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 110.144 unit UMKM, yang terdiri dari 987.643 usaha mikro level 1, 9.126 usaha mikro level 2, 1.650 usaha mikro level 3, 402 usaha mikro level 4, 142 usaha mikro level

5, 170 jumlah usaha kecil dan 11 jumlah usaha menengah. Pemerintah Kabupaten Sleman aktif mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program, seperti kegiatan temu usaha yang mempertemukan pelaku usaha mikro dengan calon mitra bisnis dari sektor pariwisata, toko oleh-oleh, dan hotel. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk UMKM dan memperluas jaringan kerjasama. Selain itu, pemerintah juga menyediakan platform digital seperti portal satu data UMKM Sleman untuk memfasilitasi pencatatan dan pemantauan data UMKM secara real-time. Berikut data rekapitulasi skala data UMKM Kabupaten Sleman khususnya bidang kuliner. Lokasi penelitian berada pada kawasan strategis yang dikelilingi oleh sejumlah perguruan tinggi ternama di Yogyakarta, seperti UII, UPN, Universitas Amikom, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, UGM, UNY, serta area Maguwoharjo. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut cukup potensial untuk mengembangkan ekosistem usaha, khususnya UMKM, karena adanya konsentrasi mahasiswa dan sivitas akademika yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap layanan modern, termasuk dalam hal transaksi pembayaran digital.

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Skala Data

No	Sektor Usaha	Mikro Lv 1	Mikro Lv 2	Mikro Lv 3	Mikro Lv 4	Mikro Lv 5	Ke cil	Mene ngah	Jumlah
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23541	1606	219	30	18	11	0	25.425

Sumber Portal Satu Data UMKM Kabupaten Sleman

Penelitian mengenai adopsi teknologi pembayaran digital, khususnya QRIS, telah banyak dilakukan guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat pengguna dalam menggunakannya. Penelitian relevan oleh Fardani et al. (2024) literasi keuangan, persepsi kegunaan dan kemudahan tersebut secara positif dan signifikan, memengaruhi minat adopsi QRIS. Di samping itu, Hidayatulah et al. (2023) kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan kepercayaan memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, sedangkan efektivitas dan risiko tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian oleh Ibnu et al. (2021) persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS. Sementara itu, persepsi risiko memiliki pengaruh negatif terhadap minat penggunaan, dan literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman serta kepercayaan pelaku usaha dalam memanfaatkan QRIS sebagai sarana transaksi digital. Dengan demikian, penelitian ini berperan sebagai landasan yang relevan untuk mengembangkan studi serupa dengan variabel tambahan, yakni sistem informasi akuntansi, guna memperluas pemahaman tentang integrasi teknologi keuangan dalam praktik manajerial UMKM, khususnya di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis pemanfaatan QRIS serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta memberikan wawasan yang dapat membantu UMKM dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi pembayaran digital. Dengan demikian, merujuk pada uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini dirancang untuk menganalisis persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, risiko dan literasi keuangan dan sistem informasi akuntansi yang mempengaruhi pelaku UMKM menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran digital di Kabupaten Sleman. Sehingga penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, Risiko, Literasi Keuangan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Penggunaan QRIS pada UMKM Kabupaten Sleman.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dalam menggunakan QRIS?
2. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dalam menggunakan QRIS?
3. Apakah risiko berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dalam menggunakan QRIS?
4. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dalam menggunakan QRIS?
5. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dalam menggunakan QRIS?
6. Apakah persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, risiko, literasi keuangan, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dalam menggunakan QRIS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Menganalisis apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS.
2. Menganalisis apakah persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS.
3. Menganalisis apakah risiko berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS.
4. Menganalisis apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS.
5. Menganalisis apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS.

6. Menganalisis apakah persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, risiko, literasi keuangan, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dalam menggunakan QRIS.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Mampu meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor pendorong minat UMKM dalam memanfaatkan QRIS. Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Mampu menambah literatur serta pengetahuan bagi pelaku UMKM untuk mengimplementasikan QRIS di dalam usahanya.

3. Kontribusi Kebijakan

Pemerintah dan Bank Indonesia dapat meningkatkan sosialisasi serta memberikan insentif agar lebih banyak UMKM mengadopsi QRIS. Selain itu, perbaikan infrastruktur digital diperlukan untuk memastikan kelancaran transaksi. Bagi UMKM, penelitian ini menekankan pentingnya literasi keuangan dan keamanan dalam penggunaan QRIS untuk mengurangi risiko keuangan. Sementara itu, lembaga keuangan dapat mengembangkan sistem terintegrasi dan menyediakan akses kredit berbasis transaksi QRIS. Dengan kebijakan yang tepat, QRIS dapat meningkatkan efisiensi bisnis dan memperkuat ekosistem keuangan digital di Kabupaten Sleman.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, risiko, literasi keuangan, dan sistem informasi akuntansi terhadap penggunaan QRIS di kalangan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor terhadap keputusan UMKM dalam mengadopsi QRIS sebagai sistem pembayaran digital. Batasan penelitian ini yaitu UMKM pada bidang kuliner dan

keterbatasan mengenai pengisian kuisisioner yang tidak semua UMKM didampingi oleh penulis.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA